

JAMB
(Jurnal Aplikasi Manajemen & Bisnis)

Available online <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/IAMB>

**Evaluasi Kinerja Manajemen dan Keuangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2014-2018**

Dwi Riana

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Tridinanti Palembang, Indonesia

email : dwiriana@univ-tridinanti.ac.id

Received : Januari 2021

Revised : Februari 2021

Accepted : Maret 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja manajemen dan keuangan Pemerintah Sumatera Selatan tahun 2014-2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Sumatera Selatan tahun 2014-2018 dan data pendukung lainnya yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Sumatera Selatan. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menghitung dan menganalisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Sumatera Selatan tahun anggaran 2014-2018 sudah cukup baik. Adapun rasio kemandirian rata-ratanya adalah 39,06% termasuk dalam pola hubungan konsultif, rasio efektivitas rata-ratanya adalah 92,38% termasuk dalam kriteria efektif, rasio efisiensi rata-ratanya adalah 74,87% termasuk dalam kriteria efisien. Selanjutnya, rata-rata rasio aktivitas belanja operasi adalah 79,62% dan rata-rata rasio aktivitas belanja modal yaitu 19,43%. Jika dilihat dari rasio aktivitas, Pemerintah Sumatera Selatan lebih mengutamakan belanja operasi dibandingkan belanja modal. Selain itu, rasio pertumbuhan dari tahun 2014-2018 menunjukkan hasil yang fluktuatif.

Kata Kunci: Kinerja keuangan, Kinerja manajemen, Rasio keuangan, Sumatera Selatan

Abstract

This research aims to study the management and financial performance of the Government of South Sumatra in 2014-2018. This research is quantitative descriptive. The research used secondary data from the financial report of South Sumatra for 2014-2018 and other supporting data sourced from the Regional Financial Management Agency (BPKD) of the South Sumatra Government. The analysis technique used in this study is to calculate and analyze the financial ratios to the APBD that have been implemented. Based on the results of data processing and discussion of the results of the study, the South Sumatra Government's financial year for 2014-2018 was good enough. While the average independence ratio is 39.06% included in the consultative relationship pattern, the average efficiency ratio of 92.38% is included in the effective criteria, the average acquisition ratio is 74.87% included in the efficient criteria. Furthermore, the average ratio of operating expenditure activities was 79.62% and the average ratio of capital expenditure activities was 19.43%. When viewed from the activity ratio, the Government of South Sumatra prioritizes operating expenses over capital expenditure. In addition, the growth ratio from 2014-2018 showed fluctuating results.

Keywords: Financial performance, Managerial performance, Financial ratio, South Sumatra

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan merupakan indikator untuk melihat sehat atau tidaknya suatu lembaga atau organisasi. Maka dari itu, sangat penting untuk mengukur kinerja keuangan di suatu organisasi. Salah satu cara untuk mengukur kinerja manajemen dan keuangan dengan cara menganalisis sebuah laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik (Mahmudi, 2016). Salah satu organisasi yang perlu melakukan pengukuran kinerja manajemen dan keuangan adalah organisasi sektor publik atau pemerintahan.

Pemerintah Daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Maka dari itu, evaluasi kinerja dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Sumatera Selatan

merupakan salah satu provinsi yang cukup besar di Indonesia. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD (Halim dan Kusufi, 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul evaluasi kinerja manajemen dan keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014-2018.

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory

Agency theory berhubungan tentang principal dan agen. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat (Sudarsana, 2013).

Pengukuran Kinerja Keuangan.

Menurut Purnamasari (2019), Pengukuran kinerja keuangan mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan kinerja keuangan suatu instansi serta mengevaluasi kinerja

keuangan dan menetapkan tujuan untuk kinerja masa mendatang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Mardiasmo (2012:103) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat pengendalian utama bagi pemerintah sebagai alat untuk mengambil keputusan dalam perencanaan pembangunan dan menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, standar evaluasi kinerja, otorisasi pengeluaran untuk masa depan dan alat pengaturan bermacam unit kerja pada seluruh aktivitas kerja.

Tabel 1. Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Daerah

Kemampuan Daerah	Rasio Kemandirian (%)	Keterangan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2004)

Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain :

a. Pola hubungan instruktif yaitu peranan Pemerintah Pusat lebih dominan

daripada kemandirian Pemerintah Daerah

b. Pola hubungan konsultif yaitu peranan Pemerintah Pusat

c. Pola hubungan partisipatif yaitu peranan Pemerintah Pusat

d. Pola hubungan delegatif yaitu peranan Pemerintah Pusat

Tabel 2. Kriteria Penilaian Efektifitas Keuangan Daerah

Efektifitas Keuangan Daerah	Kriteria
>100 %	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber : Mahmudi (2016)

Tabel 3. Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah	Kriteria
>100 %	Tidak efisien
90%-100%	Kurang efisien
80%-90%	Cukup efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat efisien

Sumber: Mahsun Moh (2006)

METODE

Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi Anggaran Pemerintah Sumatera Selatan tahun anggaran 2014-2018.

Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang

terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Sumatera Selatan periode 2014-2018 dan data pendukung lainnya yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Sumatera Selatan.

Pada penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Sumatera Selatan tahun anggaran 2014-2018. Adapun metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola

keuangan daerahnya dilihat dari perhitungan rasio-rasio.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

a. Analisis Perhitungan Rasio Kemandirian

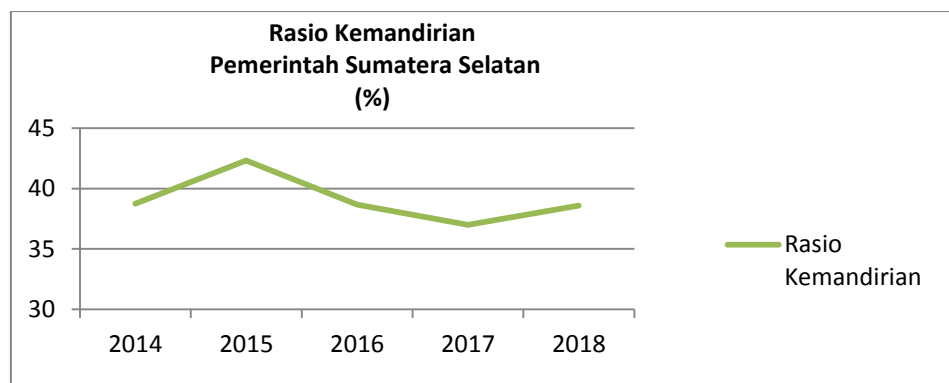
Berdasarkan perhitungan dari data yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014-2018 Provinsi Sumatera Selatan, diperoleh hasil berikut ini :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4 Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Sumatera Selatan 2014-2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian	Kriteria Kemampuan Daerah
2014	2.442.673.788.768,86	6.252.136.312.520,51	38,75	Rendah
2015	2.534.526.413.315,20	5.990.424.062.511,95	42,31	Rendah
2016	2.546.177.544.348,66	6.582.780.929.676,33	38,68	Rendah
2017	3.031.633.6624.303,95	8.195.968.131.799,96	36,99	Rendah
2018	3.528.010.712.183,54	9.141.371.395.099,79	38,59	Rendah

Sumber : Data Olahan (2020)



Gambar 1. Rasio Kemandirian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : Data Olahan,2020

Dari Gambar 1, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian Pemerintah Sumatera Selatan tahun 2014-2018 adalah sebesar 38,75% , 42,31%, 38,68%, 36,99%, dan 38,59%, Adapun rasio kemandirian daerah rata-rata dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 mencapai 39,07%. Hal ini menginterpretasikan pola kemandirian konsultif dan kemampuan daerah dikategorikan rendah (25%-50%) . Hal ini berarti bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan pada APBD provinsi Sumatera Selatan masih rendah.

Pola konsultif berarti campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena dianggap lebih mampu . Pemerintah Sumatera Selatan sudah lebih mampu dalam melaksanakan otonomi daerah walaupun masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap pemerintah pusat.

Hal ini berarti bahwa Pemerintah daerah masih ketergantungan yang cukup tinggi untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Trend Kinerja Manajemen dan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dilihat dari rasio kemandirian.

Rasio kemandirian Pemerintah Sumatera Selatan tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 3,46% dari tahun 2014. Pada tahun 2016 dan 2017, rasio kemandirian Pemerintah Sumatera Selatan mengalami penurunan sebesar 3,63% dan 1,69% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk tahun 2018, rasio kemandirian Pemerintah Sumatera Selatan mengalami peningkatan lagi sebesar 1,6%.

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian tahun 2014-2018, kinerja manajemen pada tahun 2015 paling baik diantara tahun yang lainnya yaitu sebesar 42,31%.

Analisis Tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

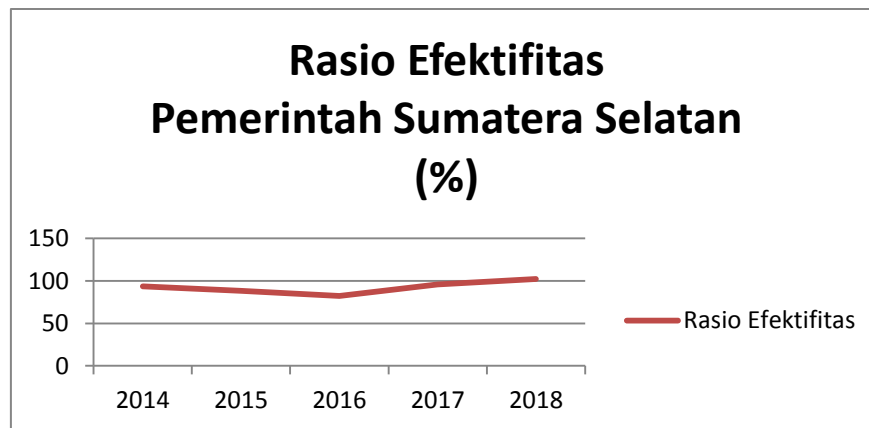
a. Analisis Perhitungan Rasio Efektifitas

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Tabel 5. Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Sumatera Selatan 2014-2018

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Target Penerimaan PAD ditetapkan (Rp)	Rasio Efektifitas	Kriteria Penilaian
2014	2.442.673.788.768,86	2.595.724.088.303,00	93,33	Efektif
2015	2.534.526.413.315,20	2.871.976.896.280,09	88,26	Efektif
2016	2.546.177.544.348,66	3.093.908.308.589,91	82,30	Efektif
2017	3.031.633.624.303,95	3.165.360.996.255,00	95,78	Efektif
2018	3.528.010.712.183,54	3.449.590.628.837,14	102,27	Efektif

Sumber : Data Olahan (2020)



Gambar 2. Rasio Efektifitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : Data Olahan (2020)

Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui bahwa rasio efektifitas Pemerintah Sumatera Selatan tahun 2014-2018 adalah sebesar 93,33% , 88,26%, 82,3%, 95,78%, dan 102,27%. Adapun rasio efektifitas daerah rata-rata dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 mencapai 92,39%. Berdasarkan kriteria penilaian efektifitas keuangan daerah, kinerja keuangan Pemerintah Sumatera Selatan dalam 5 tahun terakhir masuk dalam kategori tingkat efektifitas keuangan yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya.

b. Trend Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dilihat dari Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas Pemerintah Sumatera Selatan dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi nilai. Adapun pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan berturut-turut sebesar 5,04% dan 5,98% dari tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2017 dan 2018, rasio efektifitas Pemerintah Sumatera Selatan mengalami peningkatan berturut-turut

sebesar 13,48% dan 6,49 % dari tahun sebelumnya.

Analisis Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

a. Analisis Perhitungan Rasio Efisiensi

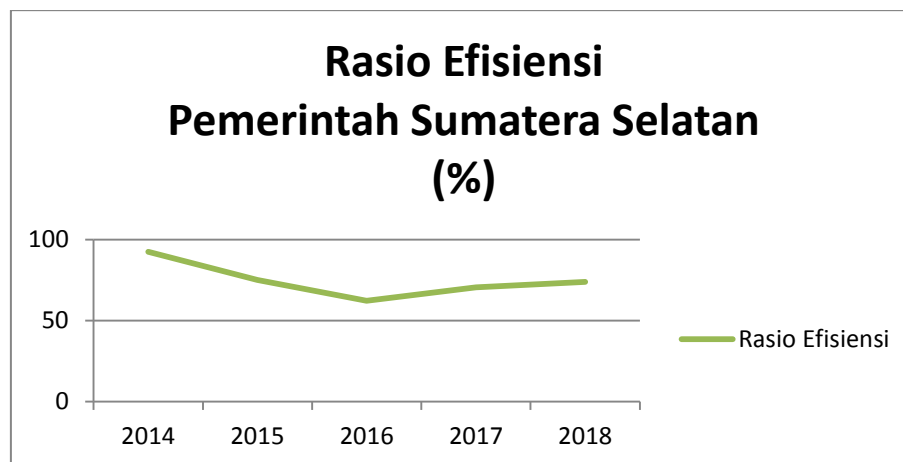
Berdasarkan perhitungan dari data yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014-2018 Provinsi Sumatera Selatan, diperoleh hasil berikut ini :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 6. Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Sumatera Selatan 2014-2018

Tahun	Total Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Total Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (Rp)	Kriteria Penilaian
2014	5.781.570.143.910,34	6.252.136.312.520,51	92,74	Kurang Efisien
2015	4.497.889.160.889,22	5.990.424.062.511,95	88,25	Cukup Efisien
2016	4.094.471.321.477,03	6.582.780.929.676,33	62,20	Efisien
2017	5.788.552.562.667,59	8.195.968.131.799,96	70,63	Efisien
2018	6.763.760.533.371,09	9.141.371.395.099,79	73,99	Efisien

Sumber : Data Olahan (2020)



Gambar 3. Rasio Efisiensi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : Data Olahan,2020

Berdasarkan Gambar 3, dapat diketahui bahwa rasio efisiensi Pemerintah Sumatera Selatan tahun 2014-2018 adalah sebesar 92,47% , 88,25%, 62,2%, 70,63%, dan 73,99%, Adapun rasio kemandirian daerah rata-rata dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 mencapai 74,88%. Berdasarkan kriteria penilaian efisiensi keuangan daerah, kinerja keuangan Pemerintah Sumatera

Selatan dalam 5 tahun terakhir masuk dalam interval 60%-80% yang berarti menunjukkan kinerja yang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengeluarkan biaya tidak terlalu besar, tetapi output yang dihasilkan cukup besar. Hal ini berarti menggambarkan kinerja pemerintah Sumatera Selatan bisa dikategorikan baik.

b. Trend Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dilihat dari rasio efisiensi

Jika dilihat dari data yang sudah dianalisis, Pemerintah Sumatera Selatan

dalam menggunakan anggaran untuk belanja pada tahun 2014 hingga 2018 memiliki trend yang fluktuatif. Dari data 2014-2018, tahun 2016 merupakan tahun yang paling efisien dalam menggunakan dana dalam belanja daerah dibandingkan tahun yang lainnya.

Analisis Aktivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

a. Analisis Perhitungan Rasio Aktivitas

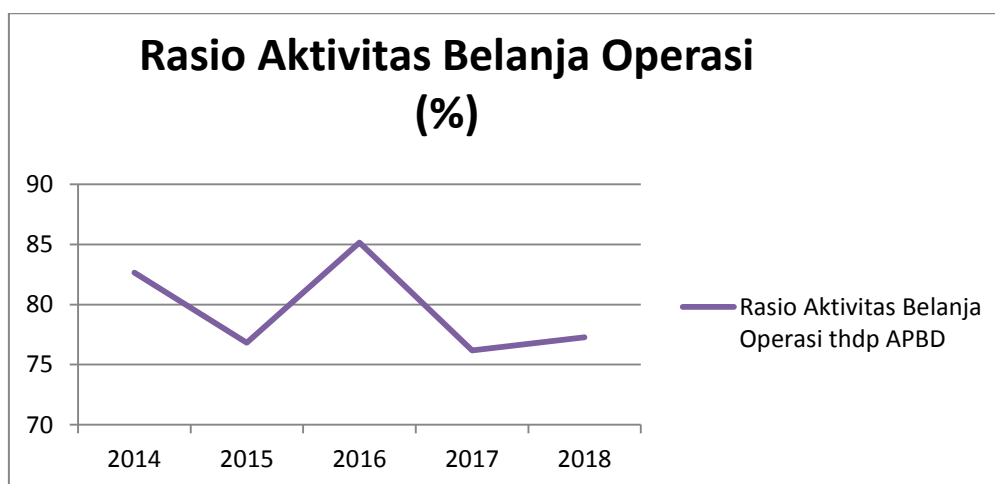
Rasio Belanja Operasi terhadap APBD

$$= \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 7 Perhitungan Rasio Operasi Belanja Pemerintah Sumatera Selatan 2014-2018

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)
2014	4.778.821.100.969,86	5.781.570.143.910,34	82,66
2015	3.455.828.230.120,96	4.497.889.160.889,22	76,84
2016	3.486.550.394.731,75	4.094.471.321.477,03	85,16
2017	4.410.377.592.244,00	5.788.552.526.667,59	76,19
2018	5.226.350.947.402,94	6.763.760.533.371,09	77,27

Sumber : Data Olahan (2020)



Gambar 4. Rasio Aktivitas Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : Data Olahan (2020)

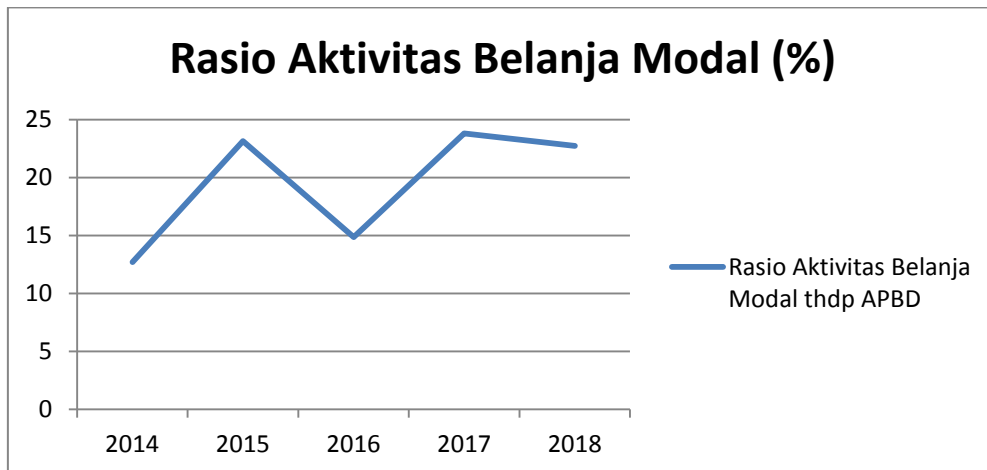
Rasio Belanja Modal terhadap APBD

$$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 8. Perhitungan Rasio Aktivitas Belanja Modal Pemerintah Sumatera Selatan 2014-2018

Tahun	Total Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal (%)
2014	733.382.214.935,71	5.781.570.143.910,34	12,69
2015	1.041.021.930.768,26	4.497.889.160.889,22	23,15
2016	607.740.926.745,28	4.094.471.321.477,03	14,85
2017	1.377.382.678.423,69	5.788.552.526.667,59	23,79
2018	1.537.275.105.768,15	6.763.760.533.371,09	22,73

Sumber : Data Olahan (2020)



Gambar 5. Rasio Aktivitas Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan hasil perhitungan rasio aktivitas, ditunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lebih banyak mengalokasikan dananya untuk belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Hal ini menyebabkan rasio belanja modal terhadap APBD menjadi sangat rendah. Besarnya belanja operasi dikarenakan adanya penambahan jumlah pegawai negeri sipil dan perjalanan dinas yang dilakukan pegawai negeri sipil.

Adapun rasio aktivitas pada tahun 2014 untuk belanja operasi sebesar 82,66% dan belanja modal sebesar 12,69%. Selanjutnya di tahun 2015, rasio aktivitas untuk belanja operasi sebesar 76,84% dan belanja modal sebesar 23,15%. Pada tahun 2016, rasio aktivitas untuk belanja operasi sebesar 85,16% dan belanja modal sebesar 14,85%. Di tahun 2017, rasio aktivitas untuk belanja operasi sebesar 76,19 % dan belanja modal

sebesar 23,79%. Pada tahun 2018, rasio aktivitas untuk belanja operasi sebesar 77,27% dan belanja modal sebesar 22,73%. Rata-rata dari rasio aktivitas belanja operasi pada Pemerintah Sumatera Selatan tahun 2014-2018 yaitu sebesar 79,6%, dan rata-rata dari rasio belanja modal sebesar 19,4 %. Pemerintah Sumatera Selatan terus mengupayakan pembangunan atau investasi modal jangka panjang di daerahnya.

1. Analisis Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan PAD =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Realisasi Pertumbuhan Σ Pendapatan =

$$\frac{\text{Realisasi Pertumbuhan } \Sigma \text{ Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pertumbuhan } \Sigma \text{ Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi =

$$\frac{\text{Realisasi Pertumbuhan Belanja Operasi } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pertumbuhan Belanja Operasi } X_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal =

$$\frac{\text{Realisasi Pertumbuhan Belanja Modal } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Pertumbuhan Belanja Modal } X_{n-1}} \times 100\%$$

1. Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

$$\text{a. } \frac{Rp 2.534.526.413.315,2 - Rp 2.422.673.788.768,86}{Rp 2.422.673.788.768,86} \times 100\%$$

$$= 4,62 \%$$

$$\text{b. } \frac{Rp 2.546.177.544.348,66 - Rp 2.534.526.413.315,2}{Rp 2.534.526.413.315,2} \times 100\%$$

$$= 0,46 \%$$

$$\text{c. } \frac{Rp 3.031.633.624.303,95 - Rp 2.546.177.544.348,66}{Rp 2.546.177.544.348,66} \times 100\%$$

$$= 19,07\%$$

$$\text{d. } \frac{Rp 3.528.010.712.183,54 - Rp 3.031.633.624.303,95}{Rp 3.031.633.624.303,95} \times 100\%$$

$$= 16,37\%$$

2. Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{a. } \frac{Rp 5.990.424.062.511,95 - Rp 6.252.136.312.520,51}{Rp 6.252.136.312.520,51} \times 100\%$$

$$= -4,2\%$$

$$\text{b. } \frac{Rp 6.582.780.929.676,33 - Rp 5.990.424.062.511,95}{Rp 5.990.424.062.511,95} \times 100\%$$

$$= 9,89 \%$$

$$\text{c. } \frac{Rp 8.195.968.131.799,96 - Rp 6.582.780.929.676,33}{Rp 6.582.780.929.676,33} \times 100\%$$

$$= 24,5\%$$

$$\text{d. } \frac{Rp 9.141.371.395.099,79 - Rp 8.195.968.131.799,96}{Rp 8.195.968.131.799,96} \times 100\%$$

$$= 11,5 \%$$

3. Perhitungan Pertumbuhan Belanja Operasi

$$\text{a. } \frac{Rp 3.455.829.230.120,96 - Rp 4.778.821.100.969,86}{Rp 4.778.821.100.969,86} \times 100\%$$

$$= -27,68\%$$

$$\begin{aligned}
 \text{b. } & \frac{\text{Rp } 3.486.550.394.731,75 - \text{Rp } 3.455.829.230.120,96}{\text{Rp } 3.455.829.230.120,96} \times 100\% \\
 & = 0,89 \% \\
 \text{c. } & \frac{\text{Rp } 4.410.377.592.244 - \text{Rp } 3.486.550.394.731,75}{\text{Rp } 3.486.550.394.731,75} \times 100\% \\
 & = 26,5 \% \\
 \text{d. } & \frac{\text{Rp } 5.226.350.947.402,94 - \text{Rp } 4.410.377.592.244}{\text{Rp } 4.410.377.592.244} \times 100\% \\
 & = 18,5\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{a. } & \frac{\text{Rp } 1.041.021.930.768,26 - \text{Rp } 733.382.314.935,71}{\text{Rp } 733.382.314.935,71} \times 100\% \\
 & = 41,94\% \\
 \text{b. } & \frac{\text{Rp } 607.740.926.745,28 - \text{Rp } 1.041.021.930.768,26}{\text{Rp } 1.041.021.930.768,26} \times 100\% \\
 & = - 41,6 \% \\
 \text{c. } & \frac{\text{Rp } 1.377.382.678.423,69 - \text{Rp } 607.740.926.745,28}{\text{Rp } 607.740.926.745,28} \times 100\% \\
 & = 126,6 \% \\
 \text{d. } & \frac{\text{Rp } 1.537.275.105.768,15 - \text{Rp } 1.377.382.678.423,69}{\text{Rp } 1.377.382.678.423,69} \times 100\% \\
 & = 11,6\%
 \end{aligned}$$

4. Perhitungan Pertumbuhan Belanja Modal

Tabel 9 Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018

Keterangan	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	Rata-rata (%)
Rasio Kemandirian	38,75	42,31	38,68	36,99	38,59	39,06
Rasio Efektivitas	93,33	88,26	82,30	95,78	102,27	92,38
Rasio Efisiensi	92,74	88,25	62,20	70,63	73,99	74,87
Rasio Aktivitas Belanja Operasi	82,66	76,84	85,16	76,19	77,27	79,60
Rasio Aktivitas Belanja Modal	12,69	23,15	14,85	23,79	22,73	19,43
Rasio Pertumbuhan PAD		4,62	0,46	19,07	16,37	10,13
Rasio Pertumbuhan Pendapatan		-4,2	9,89	24,50	11,50	10,40
Rasio Pertumbuhan Operasi		-27,68	0,89	26,50	18,50	4,55
Rasio Pertumbuhan Modal		41,94	-41,60	126,60	11,60	34,63

Sumber : Data Olahan (2020)

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Sumatera Selatan tahun anggaran 2014-2018 sudah cukup baik. Adapun rasio kemandirian rata-ratanya adalah 39,06% termasuk dalam pola hubungan konsultif, rasio efektivitas rata-ratanya adalah 92,38% termasuk dalam kriteria efektif, rasio efisiensi rata-ratanya adalah 74,87% termasuk dalam kriteria

efisien. Selanjutnya, rata-rata rasio aktivitas belanja operasi adalah 79,62% dan rata-rata rasio aktivitas belanja modal yaitu 19,43%. Jika dilihat dari rasio aktivitas, Pemerintah Sumatera Selatan lebih mengutamakan belanja operasi dibandingkan belanja modal. Selain itu, untuk rasio pertumbuhan dari tahun 2014-2018 menunjukkan hasil yang fluktuatif. Adapun rata-rata dari rasio pertumbuhan PAD, rasio pertumbuhan

pendapatan, rasio pertumbuhan belanja modal, dan rasio pertumbuhan belanja operasi, berturut-turut sebesar 10,13%, 10,4%, 4,55%, dan 34,63%.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa variable *personal selling* (X1) dan *sales promotion* (X2) berpengaruh terhadap keputusan pembelian (Y) sepeda motor di Kota Sekayu, baik secara parsial maupun simultan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan J. Dubinsky. (2013). A factor analytic study of the personal selling process. *Journal of personal selling & sales management*. Vol. 1 issue 1 pp 26-33.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Perkembangan jumlah kendaraan Bermotor menurut jenis (unit), 2017-2019. [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id) diakses 11 Januari 2021.
- Barton, A. Weitz and Kevin D. Bradford. (1999). Personal selling and sales management: a relationship marketing perspective. *Journal of the academy of marketing*.
- Daramola, GC, Okafor, LI and Bello, MA. (2014). Sales promotion on consumer purchasing behavior. *International journal of business and marketing management* Vol.2 (1): 8-13.
- E. Genchev and G. Todorova. (2017). Sales promotion activities-effective tool of marketing communication mix. *Trakia journal of science*, Vol.15 Suppl.1, pp 181-185.
- Gunasekharan T., Shaik Suraj Basha, and B.C. Lakshmana (2015). A study on impact of promotion mix elements: advertising, personal selling & public relation of DTH Manufacturers on customer behavior. *International journal of Art, Humanities and Management Studies*. Vol 1, No.6 pp. 20-30.
- Indonesia-Investments. (2014). Despite long term growth, Indonesia's sales of motorcycles fall at end 2013. Di post 7 Januari 2014, diakses pada 12 Januari 2020. [Despite Long Term Growth. Indonesia's Sales of Motorcycles Fall at End 2013 | Indonesia Investments \(indonesia-investments.com\)](https://indonesia-investments.com)
- Jacob, O.O. (2019). Effect of personal selling on consumer impulse buying behavior: evidence from selected quoted foods and beverages firm in Nigeria. *Global journal of management and business research: e marketing* Vol.19 issue 4 pp 17-24.
- Kotler dan Armstrong. (2008). *Principle of marketing*. Pearson Prentice Hall, New Jersey
- Kumar, Kaul Vijay. (2012). *Business organization and management: text and cases*. Pearson: Delhi.
- M. Ghafran Ashraf and Muhammad Rizwan, (2014). The promotional tools and situational factor's impact on consumer buying behavior and sales promotion. *Journal of public administration and governance* Vol. 4 No.2 pp 179-201.
- Murianki Morris Murithi. (2015). Effect of personal selling on sales: a case of woman group in imenti North District, Meru Country, Kenya. *International journal of academic research in business and social sciences*. Vol.5, No.1 pp 38-52
- Sunil Erevelles and Nobuyuki Fukawa. (2013). The role of affect in personal selling and sales management. *Journal of personal selling & sales management*. Vol.33 Issue 1, pp 7-24.
- Syed Ali, A, Waqas M., Syed Aun A, Mazhar M., Muhammad F. (2015). Impact of sales promotion on consumer buying behavior in Pakistan. *International interdisciplinary journal of scholarly research (IIJSR)*. Vol.1 No.3 pp 13-22.